

PERANAN SULTAN MARDAN ALI DI KESULTANAN BUTON: 1647 -1654 M

Oleh:
Asniati
Syahrin
La Ode Marhini
(Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo)

Abstract

This study aims to determine the profile of Sultan Mardan Ali, to determine the role of Sultan Mardan Ali in the Sultanate of Buton in 1647-1654 and to determine the reasons of Sultan Mardan Ali collaborated with the Dutch Company. The method used in this study was the historical method conducted by Kuntowijoyo with the following stages: (1) topic selection, (2) source selection, (3) source verification, (4) source interpretation and (5) historiography. The result showed that Sultan Mardan Ali or La Cila was born on 5 days of the month of Maulid 980 Hijriah in 1573 AD. Before becoming sultan, Mirdan Aliserved as Kapitalau or commander of the East region of the Buton Sultanate. Mardan Ali was appointed the 8th Sultan of Buton by Bhonto Siolimbona in 1647 with the title Sultan Mardan Ali. The role of Sultan Mardan Alin in the Sultanate of Buton covered the field of politics, economics and government. Sultan Mardan Ali also had a cooperative relationship with the Dutch. Sultan Mardan Ali cooperated with the Dutch because the Sultan wanted to restore relations between Buton and the VOC, which had previously been unfavorable through the Sultan of Ternate.

Keywords: Sultan Mardan Ali, Sultanate of Buton, History of Buton

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Sultan Mardan Ali terhadap Kesultanan Buton pada tahun 1647-1654, serta untuk mengetahui penyebab Sultan Mardan Ali bekerja sama dengan Kompeni Belanda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah menurut Kuntowijoyo dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) pemilihan topik; (2) pengumpulan sumber; (3) verifikasi sumber; (4) interpretasi sumber; (5) historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sultan Mardan Ali atau La Cila lahir pada 5 hari bulan Maulid 980 Hijriah tahun 1573 M. Sebelum menjadi sultan, Mardan Ali menjabat sebagai Kapitalau atau panglima wilayah Timur Kesultanan Buton. Mardan Ali dilantik menjadi Sultan Buton ke-8 oleh Bhonto Siolimbona pada tahun 1647 dengan gelar Sultan Mardan Ali. Peranan Sultan Mardan Ali dalam Kesultanan Buton meliputi bidang politik, ekonomi, dan pemerintahan. Sultan Mardan Ali juga melakukan hubungan kerja sama dengan Belanda. Sultan Mardan Ali bekerja sama dengan bangsa Belanda sebab Sultan ingin melakukan pemulihan hubungan antara Buton dengan VOC yang sebelumnya kurang baik melalui perantara Sultan Ternate.

Kata Kunci: Sultan, Buton, Mardan Ali

1. PENDAHULUAN

Buton adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah Tenggara pulau Sulawesi. Dalam periodisasi sejarah Buton telah tercatat dua fase penting yaitu fase pertama adalah masa pemerintahan kerajaan sejak tahun 1332 dan fase kedua adalah masa pemerintahan kesultanan yang

dimulai pada tahun 1542. Masa pemerintahan kerajaan di Buton dimulai tahun 1332 hingga pertengahan abad ke-16 dengan diperintah oleh 6 (enam) orang raja. Di antara enam orang Raja Buton tersebut terdapat dua raja perempuan yaitu Raja Wakaa-kaa dan Raja Bulawambona. Kedua Raja ini merupakan bukti bahwa sejak masa lalu derajat kaum perempuan sudah mendapat tempat yang istimewa dalam masyarakat Buton. Fase kedua adalah masa pemerintahan kesultanan sejak masuknya agama Islam di Kerajaan Buton pada tahun 948 Hijriah (1542 Masehi) bersama dilantikannya La Kila Ponto sebagai sultan pertama dengan gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis sampai pada Muhammad Falihi Kaimudin sebagai Sultan Buton ke-38 yang berakhir tahun 1960 (Zuhdi, 2010).

Kesultanan Buton merupakan salah satu kesultanan yang sejarahnya penting untuk diketahui masyarakat Indonesia. Dengan demikian, biografi Sultan yang memerintah pun sangat penting untuk diketahui. Biografi adalah kisah perjalanan seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain berdasarkan informasi dari si tokoh maupun narasumber lain (Kuntowijoyo, 2003: 203-205). Biografi dapat memberikan gambaran mengenai tokoh yang berperan penting di tengah-tengah masyarakat. Biografi mempermudah orang untuk mempelajari sejarah. Biografi dapat memberi deskripsi terhadap para pelaku sejarah, yakni zaman yang menjadi latar belakang biografi serta lingkungan sosial politiknya. Kuntowijoyo (2003: 207) mengemukakan bahwa sebuah penulisan biografi tidak perlu menulis tentang *hero*, yang menentukan jalan sejarah, cukup partisipan, bahkan *the unknown*. Sehubungan dengan kepribadian tokoh, sebuah biografi perlu memperhatikan adanya latar belakang keluarga dan perkembangan diri. Salah satu biografi sultan dalam Kesultanan Buton yang penting untuk diketahui adalah biografi Sultan Mardan Ali.

Sultan Mardan Ali adalah sultan Buton yang ke-8 yang memerintah setelah Sultan Saparagau. Sultan Mardan Ali dikenal juga dengan nama La Cila. Peranan Sultan Mardan Ali dalam Kesultanan Buton sangat penting untuk diketahui. Berry (2003:105) mengungkapkan bahwa peranan merupakan harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menepati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma di dalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan perannya atau kewajibannya. Cohen (1983:82) mengatakan bahwa kedudukan status individu akan menentukan hak-hak istimewa seseorang dalam masyarakat. Peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melakukan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peranan, peranan biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peranan dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peranan. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peranan menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat, peranan juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya (Soekanto,2012:212). Salah satu peranan Sultan Mardan Ali pada masa pemerintahannya (1647–1654) adalah terjadinya pemulihan hubungan antara Buton dengan (*Vereenidge Oostindische Compagnie*) VOC melalui perantara Ternate. Berbagai ganti rugi yang sebelumnya menjadi tuntutan VOC telah dilunasi oleh Sultan. Dengan demikian, VOC menyatakan kesediaannya untuk berdamai dengan Buton (Zahari, 1977:15).

Sultan Mardan Ali memiliki karakter kepemimpinan yang kuat. Pamudji (1986:152) mengemukakan bahwa seorang pemimpin menggerakkan pengikut dengan harapan ia berhasil mencapai tujuan organisasi akan dapat menguntungkan sehingga setiap anggota masyarakat akan terjadi suatu interaksi. Menurut Hayati (2008:2), seorang pemimpin harus ditopang oleh unsur-unsur yang bersumber dari dalam dirinya (bakat tahu sifat) dan kondisi sosial sekitarnya. Pasolong (2010:5) juga mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah cara atau teknik yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi pengikut atau bawahannya dalam melakukan kerja sama mencapai

tujuan yang telah ditentukan. Siagian (2003:43) mengemukakan bahwa seorang pemimpin yang demokratis, dihormati, dan disegani dan bukan ditakuti karena perilakunya dalam kehidupan organisasi mendorong para bawahannya menumbuhkan dan mengembangkan daya inovasi dan kreativitasnya. Sejalan dengan itu, Uchajana (1881:32) mengemukakan bahwa kepemimpinan tradisional adalah pemimpin yang tumbuh berdasarkan sejarah. Pada masa kepemimpinannya, Sultan Mardan Ali pernah menjadi komandan pasukan Buton yang diperuntukan untuk VOC dalam menumpas perlawanan Kakiali di Ambon. Bahkan Mardan Ali pernah menandatangani perjanjian Buton dengan VOC untuk mengadakan perdamaian.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai dengan Februari 2019 di Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, penelusuran sumber juga dilakukan di Perpustakaan Universitas Halu Oleo, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Laboratorium ilmu Sejarah, Perpustakaan Dayanu Ikhsanudin, Perpustakaan Daerah Sulawesi Tenggara, koleksi naskah A.M. Zahari, dan buku-buku Kesultanan Wolio yang relevan dengan penelitian ini.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian biografi. Peranan seorang tokoh menjelaskan tentang seluruh kontribusi yang pernah dilakukan oleh tokoh tersebut. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan strukturalis yaitu mempelajari suatu peristiwa dan struktur untuk saling melengkapi guna untuk menjelaskan Peranan Sultan Mardan Ali di Kesultanan Buton: 1647-1654.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber sejarah yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber visual. Sumber tertulis, yaitu sumber dokumen dan kepustakaan yang diperoleh dari arsip Keraton Butondan Kelurahan Liwuto Kecamatan Kokalukuna serta kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Baubau. Sumber lisan, yaitu sumber yang diperoleh melalui keterangan lisan atau hasil wawancara dengan beberapa informan yang dianggap mengetahui tentang sejarah pemerintahan Sultan Mardan Ali. Sumber visual, yaitu sumber yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung mengenai makam Sultan Mardan Ali dan Keraton Buton.

Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo (2013: 69–82) yang menyebutkan bahwa tahapan penelitian sejarah adalah meliputi: Pemilihan topik, Heuristik sumber Verifikasi sumber, Interpretasi sumber, dan historiografi (Penulisan sejarah).

2. PEMBAHASAN

2.1 Profil Sultan Mardan Ali sebagai Sultan ke Delapan di Buton

Sultan Mardan Ali atau La Cila lahir pada 5 hari bulan Maulid Tahun 980 Hijriah (1573 M). Tanggal kelahiran Sultan Mardan Ali tidak diketahui secara pasti, baik dari sumber lisan maupun tulisan. Mardan Ali merupakan putra Sultan Buton keempat Dayanu Iksanuddin atau La Elangi. Ibunya bernama Darmastahi Putri Sultan La Sangaji. Mardan Ali memiliki saudara kandung antara lain: La Bhalawo Sultan Buton ke-5 (1631-1632). La Bhalawo juga dikenal dengan sebutan Abdul Wahab, dan La Tumpamana atau Syamsuddin Sultan Buton ke-12. Keluarga Mardan Ali adalah penganut agama Islam yang fanatik. Mardan Ali atau La Cila menikah dengan Wa Ode Subu Putri Sapati La Nisuru dari hasil pernikahan ini, dikaruniai beberapa anak yaitu masing-masing bernama Wa Ode Safura dan Wa Ode Bha'u". Mardan Ali bersama keluarganya bertempat tinggal di Buton. (Al Mujazi Mulku Zahari, wawancara 19 Januari 2019).

La Cila pada masa kecilnya pernah mengalami sakit keras yang hampir saja membawa kematiannya. Dengan demikian La Elangi ayah La Cila memanggil seorang Tabib Kesultanan Buton yaitu Abdulah Mojina Kalau untuk mengobati dan menghidupkannya kembali putranya La Cila dengan pertolongan yang Maha Kuasa serta ilmu kebatinan dan kesaktian yang di miliki oleh Mojina Kalau La Cila dapat di sembuhkan dari sakitnya dengan prosesnya sendiri penyakit La Cila

berpindah pada seekor ayam jantan putih, melalau selemba benang yang diikatkan pada pada kaki ayam itu dan ujungnya yang lain dimasukkan ke dalam lubang hidung La Cila begitulah La Cila bergerak siuman, ayam jantan itu mati seketika. Tetapi Mojina Kalau menyampaikan kepada ayah La Cila La Elangi bahwa, “kini anakmu La Cila telah kembali hidup melalui seutas benang tapi kelak sebaliknya akan mati melalui selemba benang atau seutas benang”. (Al Mujazi Mulku Zahari, wawancara 19 Januari 2019). Sejak saat itu La Cila menjadi murid mengaji dari Mojina Kalau sampai pada pelajaran ilmu kebatinan.

Sejak kecil, Mardan Ali atau La Cila telah mempunyai keberanian untuk menentang sesuatu yang dianggap tidak benar, Mardan Ali atau La Cila mempunyai pendirian yang kuat, teguh dalam prinsip, serta berani dalam mengambil tindakan yang di anggap benar. Mardan Ali mendapat didikan dari para pejabat tinggi Kesultanan, dan juga dari paman-pamannya yang semuanya bergelar “*Sangia*” yang dianggap mulia dan keramat. Sifat La Cila yang tangkas dan cerdas menjadikannya terkemuka dikalangan kaumnya di Buton. Mardan Ali atau La Cila dipandang sebagai pahlawan oleh kaumnya di Buton, karena sejak masih muda dia telah mengabdikan dirinya pada Kesultanan Buton. sejak masa pemerintahan Sultan La Buke dan Sultan La Saparagau, La Cila telah menjabat sebagai Kapitalau dan panglima wilayah Timur Kesultanan Buton dan berbulan-bulan beroperasi di Maluku.

Kapitalao adalah jabatan yang dipegang oleh golongan bangsawan dengan tugas utamanya sebagai menteri pertahanan dan panglima perang yang dipegang oleh dua orang yaitu Kapitalau Sukanaeo (Barat), sedangkan Kapitalau Matanaeo (Timur) dalam tugas pengamanan apabila terjadi gangguan keamanan. Kapitalau bertindak tegas tanpa menunggu komando atau perintah dari dewan syara. Syara adalah Majelis Kesultanan dilihat dari segi kedudukan, jabatan dan keanggotaannya. Mardan Ali atau La Cila selaku Kapitalao dan panglima wilayah Timur Kesultanan Buton serta kehadirannya pada saat itu berasal dari keluarga istana dan merupakan anak dari Sultan Dayanu Ikhsanuddin seorang pemimpin yang cerdas, arif, bijak dan memiliki pengalaman sering melakukan pelayaran dari kerajaan menuju kerajaan lainnya.

Tugas dan tanggung jawab *kapitalau* ini cukup strategis bagi Kesultanan Buton, karena selain tetap menjaga keamanan juga sekaligus harus mampu menjadi duta-duta bangsa dalam menjalin hubungan dengan dunia luar, khususnya dalam memperlancar perdagangan antara daerah-daerah dan menjalin hubungan dengan kerajaan lain seperti, Konawe, Tiworo dan Muna. (Al Mujazi Mulku Zahari, wawancara 19 Januari 2019 Pukul 10.00-12.00 WITA). Setelah Sultan La Buke dipecat dari jabatannya sebagai Sultan ke-6, di gantikan oleh La Saparagau sebagai sultan ke-7. Pada masa pemerintahan Sultan La Saparagau La Cila masih menjabat sebagai Kapitalau dan panglima wilayah Timur kesultanan Buton. Tetapi tidak lama setelah Sultan La Saparagau menjabat, dia diturunkan dari tahta.

Setelah Sultan ke-7 diturunkan dari jabatannya, putra Sultan La Elangi yaitu La Cila diangkat sebagai Sultan Buton ke-8 dan dilantik oleh Bhonto Siolimbona pada 15 Zulqaidah 156 Hijriah Tahun 1647 dan diberi gelar “Sultan Mardan Ali”. Sultan Mardan Ali mulai menjalankan Pemerintahan pada akhir tahun 1647. Dalam menjalankan pemerintahan Sultan Mardan Ali dibantu oleh para pejabat tinggi Kesultanan Buton yaitu antara lain:

- (1) Sapati Idao sebagai Sapati,
- (2) Yarona Kenepulu diganti La Awu sebagai Kenepulu.
- (3) La Manempa sebagai Kapitalau Sukanaeyo.
- (4) Abdul Rasyid sebagai Lakina Agama.

Dewan kabinet Kesultanan yang membantu tugas-tugas Sultan (Tamburaka: 2014: 25) berfungsi sebagai :

1. Sapati adalah jabatan yang dipegang oleh golongan bangsawan (kaomu), sebagai ketua dewan kabinet atau perdana menteri yang mengurus pemerintahan dan berfungsi sebagai pelindung Sultan dan Rakyat.
2. Kenepulu adalah jabatan yang dipengang oleh golongan bangsawan dengan tugas utamanya adalah menampung aspirasi rakyat dan diteruskan kepada dewan syara, di samping bersama-sama sapati membantu Sultan selaku orang ketiga dalam kesultanan.
3. Kapitalau atau kapitaraja adalah jabatan untuk orang bangsawan yang dipegang oleh dua orang sebagai menteri pertahanan dan panglima perang yaitu Kapitalao Sukanaeo (timur) dan Kapitalao Matanaeo (barat)
4. Lakina agama adalah jabatan untuk golongan bangsawan tugasnya adalah mengurus dan mengawali pelaksanaan masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan.

Pada masa pemerintahan Sultan Mardan Ali atau La Cila pada saat itu keadaan dalam kesultanan Buton belum pulih kembali diakibatkan serangan yang dilakukan oleh Belanda. Kedatangan tentara Kompeni di Buton sudah sering kali, sehingga nampak adanya gejala yang mengkhawatirkan kepada masyarakat Buton. Golongan yang termaksud kaum musuh yaitu Belanda mengambil dan menggunakan kesempatan itu sebagai suatu yang sangat baik demi untuk kemenangannya menguasai Buton. Tetapi pada saat itu di pihak La Cila sendiri juga cukup menunjukkan kemampuannya sebagai pimpinan kesultanan, sehingga sulit bagi lawannya untuk secepatnya menyingkirkan La Cila dari kedudukannya sebagai Sultan.

Sultan Mardan Ali hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan. Sultan Mardan Ali berada dalam kedudukan yang sulit karena mendapat dakwaan dari Syara Kesultanan tentang sifat buruknya yang sering melanggar aturan kesusilaan, Sultan mempunyai kelemahan pribadi yang kemudian makin tampak jelas dalam masyarakat Buton. Sifat, tindakan dan perilakunya yang buruk sangat sulit untuk dikendalikan serta bertentangan dengan adat dan agama. Perilakunya pun dianggap melanggar aturan Kesusilaan yang ada di kesultanan Buton pada saat itu. Hal tersebut dilakukan akibat kurangnya pemahaman terhadap ilmu kebatinan yang dimilikinya dan pada akhirnya menjadi bahan untuk menggulingkan dari kedudukannya sebagai Sultan. Orang-orang besar kerajaan (syara) pada saat itu sudah sering mengadakan pertemuan-pertemuan di luar pengetahuan Sultan Mardan Ali. Pertemuan itu dibahas perbuatan-perbuatan Ali dimana perlu segera diambil tindakan ketegasan hukum atasnya demi kepentingan orang banyak. Syara harus mampu menetapkan sikap dan harus mengambil tindakan untuk menjatuhkan Sultan Mardan Ali dari jabatannya.

Akhirnya, melalui musyawarah panjang, Dewan Syara memutuskan agar Sultan Mardan Ali dipecat dari jabatannya sebagai Sultan dan dijatuhi hukuman mati. Namun, eksekusi mati terhadap Sultan Mardan Ali bukanlah langkah mudah, mengingat kuatnya dukungan Sultan. Oleh karenanya, Dewan Syara kerajaan mengusung taktik dengan menyingkirkan orang-orang dekat Sultan yang dianggap sebagai penghalang, diantaranya Kapitaraja atau Gogoli Mbela-Mbela yang tidak lain adalah paman Mardan Ali sendiri. Kemudian disusul pembunuhan terhadap 13 orang VOC yang ditempatkan oleh deFlaming sebagai pengawal Sultan Mardan Ali. Dengan disingkirkannya pasukan-pasukan Sultan ini, eksekusi mati terhadap Sultan pun dapat dilaksanakan tanpa memulai kesulitan.

Pada saat penyeberangan menuju tempat eksekusi, Sultan menoleh ke belakang sambil mengangkat sebelah tangannya yang ternyata memegang sesuatu benda sambil berkata "*Hee Bhontona Gampikaro*" artinya "hei menteri Gampikaro", yang bersamaan dengan itu benda yang ada dalam tangannya di buang ke laut. *Bhontona Gampikaro* berusaha menyelamatkan benda yang dibuang itu tetapi sudah tenggelam sehingga sia-sia belaka. Dokumen yang dibuang tenggelam itu berupa sebuah stempel Kesultanan, dokumen perjanjian-perjanjian Sultan Dayanu Ikhsanuddin dan

kitab lainnya. Eksekusi mati ini sendiri dilakukan di sebuah pulau di seberang Baubau, yang sekarang dikenal dengan Pulau Makasar. (Al Mujazi Mulku Zahari, wawancara 19 Januari 2019).



Gambar : Makam Sultan Mardan Ali

Ramalan oleh Abdullah “Mojina Kalau” yang disampaikan kepada Sultan Dayanu Ikhsanuddin ayah Sultan Mardan Ali bahwa La Cila hidup karena seutas benang merah tetapi akan mati menemui ajalnya karena seutas benang merah pula ternyata terbukti kebenarannya. Sultan Mardan Ali mengakhiri masa jabatannya Sebagai Sultan Buton ke-8 pada 6 Syawal 1064 hijriah Tahun 1654 Masehi. Akibat kesalahan yang dilakukannya, Sultan Mardan Ali dijatuhi hukuman mati di Pulau Makasar (*Liwuto makasu*). Berakhirlah perjuangan menegakkan keadilan sebagaimana sifat keadilan itu menjadi prinsip setiap pejabat tinggi Kesultanan Buton sesuai petunjuk Agama dan Doktrin “Martabat Tujuh”. Sultana Mardan Ali meninggalkan bekasnya bagi Kesultanan Buton di mana suatu tindakan terhormat dalam hukum peradilan yang tidak mengenal dan memandang bulu. Seperti halnya pepatah Buton “*bone monte indaa posala-sala*” artinya pasir rata tidak berbeda-beda, maksudnya hukum itu sama berlakunya baik rakyat biasa maupun orang-orang besar. Karena hukuman dengan jalan diikat lehernya, Sultan Mardan Ali di dalam sejarah Buton terkenal dengan nama “*Gogoli Liwuto*”.

2.2 Peranan Sultan Mardan Ali Terhadap Kesultanan Buton.

a. Peran Dalam Bidang Politik

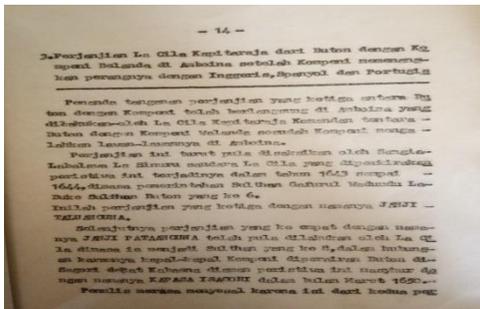
Hubungan Buton dengan Belanda kurang baik sejak Sultan Mardan Ali menjabat sebagai Kapitalau panglima wilayah Timur Kesultanan Buton. Hal itu disebabkan karena kapal-kapal Belanda sering mengunjungi Buton sehingga Buton berada dalam cengkraman politik Belanda. Menurut La Niampe (2019), Belanda tidak dapat diberi hati oleh Buton yang menyebabkan keretakan hubungan Buton-VOC yaitu peristiwa penyerangan kapal VOC bernama “*Batavia*” pada 30 Maret 1634. Peristiwa penyerangan itu dilakukan oleh dua ratus sampai tiga ratus orang Makassar di pelabuhan Baubau. Kemudian perampokan dan pembunuhan awak perahu (*fluit*) Velzean pada Januari 1635 yang terdampar di Pulau Wawonii (dibagian utara pulau Buton) dalam Tahun 1636 sebuah kapal Belanda bernama (*jacht*) Saker Douwensen milik VOC dirampok dan dibakar di pelabuhan Buton. Pemilik kapal beserta 6 orang dan penduduk lainnya dibunuh berdasarkan perintah Sultan. Hal tersebut menyebabkan keretakan hubungan Buton dengan VOC.

Pada awal Januari, Van Diemen menjadi Gubernur jenderal berusaha secara pribadi memecahkan masalah-masalah yang dialami VOC di Maluku dan Makassar. Dalam perjalanannya dari Maluku-Makassar, pada bulan Juni 1637 Van Diemen mampir di Buton. Kedua belah pihak bersikap berhati-hati sehingga tidak terjadi pertemuan pribadi antara Van Diemen dan Sultan. Melalui para utusannya, Sultan mendapat pemberitahuan bahwa utusan Belanda ingin mengadakan

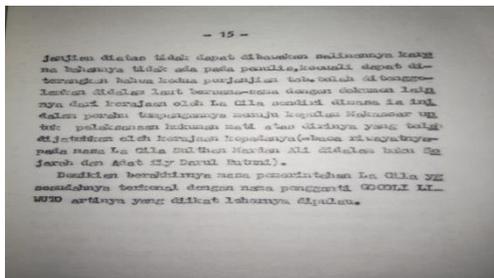
perdamaian, asal masalah-masalah yang lalu tidak dibicarakan lagi. Namun Van Diemen minta agar semua barang yang dirampok dan dirusak sewaktu penyerangan, juga barang warga sipil yang telah dibunuh, diberi ganti rugi serta senjata-senjata yang dirampok. Gubernur Jenderal Van Diemen mengunjungi Buton dengan angkatan lautnya dan menyatakan pada Sultan untuk menghentikan pembajakan kapa-kapal Belanda, karena kapal yang dibajak itu adalah kapal-kapal dagang yang harus dilindungi.

VOC menemui sekutunya Sultan Mandarsyah (Sultan Ternate) untuk menjadi penengah dalam penyelesaian permasalahannya dengan Buton, maka Sultan Mandarsyah mengusulkan agar penyelesaian permasalahan ini ditempuh secara damai. Usul ini pun akhirnya diterima oleh kedua pihak (Buton dan VOC. (La Niampe, wawancara 5 Februari 2019).

Pada pertengahan tahun 1646, Mardan Ali datang ke Ternate memohon kepada Sultan Hamzia agar mau menjadi perantara dengan VOC untuk mengadakan perdamaian. VOC memberitahu untuk hal itu kami bersedia, asal saja untuk barang-barang warga kami dan meriam-meriam yang telah dirampok, diberi ganti kerugian. Menurut Zahari, Maran Ali atau La Cila telah mengadakan persetujuan baru dengan VOC yang dikenal Buton sebagai persekutuan *Ketiga Janji taluangunadan keempat Janji pataanguna*.



Gambar : Perjanjian Sultan Buton Mardan Ali dengan Kompeni Belanda kontrak perjanjian ketiga atau *Janji taluanguna* (Sumber: Abdul Mulku Zahari)



Gambar : Perjanjian Sultan Buton Mardan Ali dengan Kompeni Belanda. Kontrak perjanjian keempat atau *Janji pataanguna* (Sumber: Abdul Mulku Zahari).

Isi perjanjian tersebut yaitu perjanjian La Cila Kapitaraja dari Buton dengan Kompeni Belanda di Ambouna setelah Kompeni memenangkan perangnya dengan Inggris, Spanyol dan Protugis. Penandatanganan yang tiga antara Buton dengan Kompeni Belanda berlangsung yang dilakukan oleh La Cila saat menjabat sebagai Kapitaraja Komandan Tentara Buton dengan Kompeni Belanda sesudah Kompeni mengalahkan lawan-lawannya di Amboina (Ambon). Perjanjian ini turut pula disaksikan oleh La Balawa Saudara La Cila yang diperkirakan peristiwa ini terjadi dalam tahun 1643-1644 di masa pemerintahan Sultan Buton ke-6 (Zuhdi, 2010: 201)

Pada bulan Maret 1650, 3 tahun setelah menjalankan pemerintahan Sultan Mardan Ali mendapat berita bahwa telah terjadi peristiwa terdamparnya kapal VOC yang sementara dalam pelayaran menuju Ternate karam di *Sagori* dekat kabaena. Armada Kapal yang mengalami musibah tersebut terdiri dari 5 buah kapal masing-masing yaitu:

- *De ijger* (Kapal jelajah berat tipe retourschip kapasitas 1.000 ton)
- *De Joffer* (Kapal jelajah menenga tipe fluyt kapasitas 480 ton)
- *Luijpaert* (Kapal jelajah ringan tipe yachta kapasitas 320 ton)
- *Bergen Op Zoom* (Kapal jelajah ringan yacht kapasitas 300 ton)
- *Aechtekercke* (Kapal jelajah cepat tipe yacht kapasitas 100 ton)

Kelima kapal yang kandas itu memuat serdadu, perbekalan dan perlengkapan (senapan, meriam). Barang-barang dan penumpang kapal yang berjumlah 581 orang dapat tertolong. Sebagian dari barang-barang itu dimuat kembali dalam kapal “*Concordia*” yang menyusul dari belakang dengan tujuan ke Ternate, sedang sisa barang beserta awak dan penumpang yang berjumlah 581 orang ditinggalkan untuk sementara di Buton (Kabaena). Para pejabat tinggi Kesultanan menganjurkan kepada Sultan Mardan Ali agar orang-orang Belanda itu dibunuh saja dan barang-barangnya diambil sebagai hasil “*Rampe*”, akan tetapi Sultan tidak menuruti nasehat mereka, dan sebaliknya memberikan pertolongan kepada pelaut VOC yang karam itu sebab mengingat adanya suatu perjanjian untuk menolong siapa saja yang mendapat kecelakaan dilaut. Peristiwa itu dikenal dalam sejarah Buton sebagai “*Kapala Yi Sagori*”.

b. Peranan dalam Bidang Ekonomi

Keadaan alam di Buton pada umumnya tidak subur karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari batu karang yang dapat tumbuh di wilayah ini adalah jenis tanaman umbi-umbian dan jagung. Sehingga menjadi urat nadi ekonomi Buton pada saat itu. Selain karena wilayahnya yang memang kepulauan, kondisi ini juga dimungkinkan karena letak geografis di tengah lalu lintas pelayaran dan perniagaan Nusantara bagian timur. Sehingga masyarakat Buton melakukan Perdagangan sebagai sumber ke hidupan perekonomian. Jauh sebelum Mardan Ali dilantik menjadi sultan La Cila atau Mardan Ali telah mengambil berbagai macam kebijakan yang dapat memakmurkan rakyat. Memanfaatkan potensi kekayaan alam pulau Buton khususnya Buton bagian timur dan sekitarnya yang dikenal sebagai salah satu penghasil rempah-rempah seperti cengkeh dan pala sehingga Sultan Mardan Ali memanfaatkan untuk melakukan hubungan perekonomian dengan bangsa-bangsa tetangga bahkandengan pihak asing seperti bangsa Belanda. Hubungan bilateral ini diharapkan agar dapat memajukan perekonomian masyarakat Buton.

Pada masa imperialisme dan kolonialisme bangsa Barat melaksanakan ekspedisi pencaharian daerah baru serta melakukan perbaikan perekonomian sehingga mencari sumber daya alam di pusatnya salah satunya di Buton. Komoditi yang diperjualbelikan di pasar perdagangan eropa pada saat itu adalah cengkeh dan pala menjadi pusat komoditi yang sangat populer di kalangan Eropa. Sehingga sultan Buton khususnya Sultan Mardan Ali memanfaatkan keadaan tersebut dengan mengadakan kerja sama dengan bangsa Barat khususnya Bangsa Belanda (La Niampe, wawancara 5 Februari 2019).

c. Peran Dalam Bidang Pemerintahan

Sultan Mardan Ali mulai menjalankan masa pemerintahan pada akhir tahun 1647 bersamaan dengan masa pemerintahan Raja Gowa I Mannuntungi Daeng Matola. Tidak berbeda dengan sultan Buton yang lain Mardan Ali juga melakukan peran dalam pemerintahan yaitu melakukan perjanjian dengan Bangsa Belanda pada saat Mardan Ali menjabat sebagai *kapitalau* atau *kapitaraja* bertujuan untuk memajukan Kesultanan Buton.

Aliansi militer merupakan sebuah koalisi negara-negara yang mengkoordinasikan tindakan mereka untuk sejumlah tujuan tertentu. Menurut Josep Nye (2009: 15), aliansi militer merupakan bentuk kesepakatan formal maupun informal yang dibentuk oleh beberapa negara dalam hal pertahanan, keamanan (*Security Issues*) dengan tujuan melindungi diri dari ancaman kekuatan lain. Pembentukan aliansi militer antara Buton dengan VOC sejak tercetusnya kontrak pertama antara

Buton dengan VOC pada masa pemerintahan Sultan Dayanu Iksanuddin. Dalam salah satu pasal kontrak tersebut dinyatakan bahwa musuh ataupun sahaabat VOC dan Ternate juga menjadi musuh ataupun sahabat Buton (Zahari, 1981, II: 29-30).

Koalisi pasukan Buton, VOC dan Ternate bekerja sama dalam mengusir pasukan Portugis di Solor pada tahun 1613. Hal ini pun berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Saparagau, dimana saat itu Buton mengirimkan tentara bantuannya kepada VOC di bahwa komando La Cila untuk menumpas pemberontakan Kakiali digunung Wawahani Hitu. Pada masa pemerintahan Sultan Mardan Ali tepatnya pada tahun 1652 Buton, VOC dan Ternate melakukan kerja sama dalam menumpas pemberontakan Sangaji Motir dan pasukannya di pulau Ambulau Buton (Zahari, 1977, I: 68). Koalisi ini juga menumpas pemberontakan Mojira yang dibantu kerajaan Gowa di Amboina sebagai bentuk penghargaan VOC terhadap Buton dengan memberikan pasukan keamanan pengawal kepada Sultan Mardan Ali, berupa 13 orang Belanda disertai pembangunan 2 buah Loji untuk memperkuat benteng pertahanan Kesultanan Buton di tepi pantai kali Baubau. Selain itu, untuk menentramkan keadaan internal Kesultanan Buton, VOC menempatkan Sultan Mandarsyah (Sultan Ternate) dan pasukannya di Kesultanan Buton.

Keadaan pemerintahan Kesultanan Buton pada masa pemerintahan Sultan Mardan Ali pada saat itu baik-baik saja walaupun terjadi berbagai macam ancaman yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan lain seperti Gowa dan Makassar. Akan tetapi Sistem pemerintahan di Kesultanan Buton mencekam atau kurang baik sejak masa pemerintahan La Buke Sultan Gafurul Wadadu karena tidak menyetujui kesepakatan antara Sultan-Sultan sebelumnya dengan pihak Belanda dan kegagalan VOC dalam melindungi Buton dari serangan kerajaan Gowa sehingga La Buke menentang Belanda ingin memutuskan hubungan kerjasama tersebut karena dianggap akan merugikan Kesultanan Buton (La Niampe wawancara, 5 Februari 2019).

Peranan Sultan Mardan Ali dalam Kesultanan Buton sangat menonjol. Hal ini dapat dilihat pada aktifitasnya terhadap beberapa kerajaan dan kesultanan seperti kerajaan Makassar, kerajaan Ternate dan bangsa Kolonial Belanda. Sehingga Kesultanan Buton sangat diperhitungkan dalam semua pengambilan kebijakan-kebijakan dalam hal ini kebijakan politik, kebijakan ekonomi, dan kebijakan sosial pihak kesultanan Buton selalu mengambil andil dalam hal tersebut.

2.3 Alasan Sultan Mardan Ali Bekerja Sama dengan Kompeni Belanda

Belanda tiba pertama kali di kepulauan Nusantara untuk melakukan perdagangan pada tahun 1596. Sebelum datang dan berdagang langsung di Nusantara, Belanda aktif sebagai pedagang perantara untuk memasarkan rempah-rempah di Eropa (Notosusanto, 1981: 31). Pada tahun 1613, sejumlah kapal dagang *Verenigde OostindieCompagnie* (VOC) dibawah komando Appolonius Scotte tiba di Buton, dan singgah pertama kali di pelabuhan Baubau. Sejak kedatangannya, VOC melihat bahwa pelayaran antara Batavia sebagai pusat pemerintahan VOC dengan Maluku sebagai pusat penghasil rempah-rempah pasti memakan waktu banyak. Oleh karena itu, di perlukan pelabuhan-pelabuhan persinggahan.

Buton yang letak geografisnya sangat strategis dalam jalur lalu lintas pelayaran dan peniagaan Nusantara pada saat itu mulai memikat hati pedangang VOC. Sehingga kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Scote yang kemudian melakukan kunjungan di istana Kesultanan Buton untuk menawarkan hubungan kerjasama. Lain dengan daerah lain seperti Banten, Makassar dan lain sebagainya, yang tampaknya cukup was-was dengan kehadiran dan tawaran kerjasama yang dilakukan VOC terhadap mereka. Di Buton justru kedatangan dan tawaran kerjasama dari COV ini lansung mendapatkan sambutan hangat dari para pembesar kerajaan, khususnya Sultan Dayanu Iksanuddin atau La Elangi. Berlandaskan dari berbagai sumber, setidaknya hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu factor internal dan factor eksternal

Faktor internal yaitu adanya kepentingan pribadi Sultan La Elangi, di mana kehadiran VOC dianggap dapat memperkuat posisinya sebagai Sultan, sehingga kedepannya tahta kepemimpinan dapat diwariskan juga kepada anak cucunya. Faktor eskternal, yaitu adanya keinginan Sultan untuk mewujudkan Buton sebagai imperum besar yang relatif stabil dan aman khususnya di kawasan Sulawesi Tenggara. Sebagaimana diketahui bahwa letak geografis Kesultanan Buton yang berada di tengah-tengah lalu lintas pelayaran dan perniagaan Nusantara menjadikannya sebagai kawasan yang relatif tidak aman dari berbagai ancaman, baik ancaman bajak laut, Kerajaan Ternate di Timur, maupun Gowa di Barat (La Niampe, wawancara 5 Februari 2019).

Keberhasilan VOC menjalin persekutuan dengan Buton ini dianggap sebagai langkah taktis dalam mengalahkan dua pesaing utamanya yang juga berusaha menanamkan pengaruhnya di Kesultanan Buton, yaitu Gowa dan Ternate. Disini penulis melihat, pendekatan diplomasi yang dilakukan VOC lebih efektif untuk merangkul Buton sebagai sekutunya, dibandingkan Ternate maupun Gowa yang kerap kali menggunakan pendekatan kekerasan.

Pada masa pemerintahan Sultan Mardan Ali (1647-1654) telah terjadi pemulihan hubungan antara Buton dengan VOC melalui perantara ternate. Berbagai ganti rugi yang selama ini menjadi tuntutan VOC telah dilunasi oleh Sultan. Dengan demikian, VOC menyatakan kesediaannya untuk berdamai dengan Buton. Sebagai realisasi dari kontrak ini, baik Buton maupun VOC saling membantu dalam berbagai hal (Zahari, 1981, II: 24). Beberapa kali VOC memberikan bantuan kepada Buton selama masa pemerintahan Sultan Mardan Ali yaitu memberikan bantuan pengawal kepada Sultan Mardan Ali yang totalnya berjumlah 13 orang disertai obat pasang 100 pond. Pembangunan 2 buah loji sebagai benteng pertahanan pantai di tepikali Baubau. Penempatan Sultan Mandarsyah (Sultan Ternate) dan pasukannya untuk menentramkan keadaan internal Kesultanan Buton. sementara bantuan Buton kepada VOC adalah penyelamatan awak dan penumpang kapal VOC yang karam dipulau sagori, memberikan bantuan pasukan dalam menumpas pemberontakan di pulau Ambulau, serta mengirimkan tentara bantuan ke Amboina. De Flaming sendiri dalam perjalanannya baik dari Ternate ke Jakarta atau dari Jakarta ke Ternate selalu menyempatkan diri untuk singgah terlebih dahulu di Buton. Meskipun hubungan Buton-VOC pada masa pemerintahan Sultan Mardan Ali berlangsung sangat harmonis, akan tetapi sikap mardan Ali yang sering melanggar adat, agama dan melakukan kontrak sepihak dengan VOC telah membawa kekhawatiran bagi masyarakat Buton khususnya Dewan Syara Kerajaan.

Sultan Mardan Ali mengadakan hubungan dengan bangsa Belanda karena sejak tanggal 5 Januari 1613 telah mengikat perjanjian kontrak antara Buton dengan Belanda yang mana pada saat itu Sultan La Elangi atau Dayanu Ikhsanuddin menjabat sebagai Sultan keempat. Setelah perjanjian dengan Belanda maka wajib setiap Sultan yang memerintah di Kesultanan Buton Setelah La Elangi untuk menjalankan isi kontrak perjanjian yang di buat dengan Belanda dan perjanjian tersebut harus di perbarui tiap tahun dengan Belanda dengan alasan untuk menjaga kestabilan dan ketentraman serta kedayaman pada masyarakat Buton dari ancaman Kerajaan Ternate dan Gowa.

3. PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sultan Mardan Ali atau La Cila lahir pada 5 hari bulan Maulid 980 Hijriah tahun 1573. Mardan Ali mendapat didikan dari paman-pamannya yang semua bergelar *Sangia*. Sebelum menjadi Sultan Mardan Ali menjabat sebagai Kapitalau atau panglima wilayah timur Kesultanan Buton. Setelah itu Mardan Ali dilantik menjadi sultan Buton ke-8 oleh Bhonto Siolimbona pada 15 Zulqaidah 1056 Hijriah atau tahun 1647 dengan gelar Sultan Mardan Ali.

Peranan sultan Mardan Ali di Kesultanan Buton yaitu mengadakan kerja sama dengan kerajaan dan kesultanan lain serta pihak kolonial Belanda, dengan tujuan untuk menopang sistem politik, ekonomi sosial dan budaya masyarakat Buton. Sultan Mardan Ali mengadakan kerja sama dengan bangsa Belanda dengan tujuan untuk mempertahankan keutuhan wilayah kesultanan Buton dari berbagai macam ancaman bangsa-bangsa tetangga sebab Mardan Ali merasa bahwa bangsa kolonial Belanda merupakan bangsa yang sangat besar dan kuat untuk dijadikan sebagai mitra atau sekutu.

DAFTAR PUSTAKA

- Berry, David, 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Cohen, Brunce, 1983. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah: Edisi Kedua*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Notosusanto, Nugroho, 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Nye, Joseph. 2009. *Understanding Internasional Conflict*. New York: pearson Logman.
- Pamudji. 1986. *Kepemimpinan Pemerintah Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Pasalong, Harbani, 2010. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabetacv.
- Schoorl, J. W. 1989. *Modernisasi "Sociologie Der Modernisering"*. Jakarta: Gramedia.
- Soekanto, Soerjono, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PerssJakarta: Penerbit Rajawali.
- Tamburaka, Rustam E. 2004. *Sejarah Sulawesi Tenggara dan 40 Tahun Sultra Membangun*.
- Uchajana, Onong Effendy. 1981. *Kepemimpinan dan Komunikasi*. Bandung: Bina Insan.
- Wa Hayati. 2006. *Peranan Sultan Dayanu Ikhsanuddin Dalam Pembinaan Sosial, Politik, Agama dan Budaya Masyarakat Di Kesultanan Buton (1597-1631)*. FKIP Unhalu: Skripsi. Kendari.
- Zahari, Abdul Mulku. 1977. *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton) Jilid I, II, dan III*, Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Zuhdi, Susanto dkk. 2010. *Sejarah Buton yang Terabaikan: Labu Rope Labu Wana*. Jakarta: Rajawali Pers.